

DATABASE PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGAH TAHUN 2025



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



SAMBUTAN

Warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Hal tersebut merupakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk menjamin pelaksanaan program penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih tepat sasaran, penggunaan dan tepat waktu, maka dibutuhkan data kondisi perumahan yang detail dan lebih operasional dan akan digunakan dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Data yang idealnya mampu menyajikan informasi yang lebih spesifik sampai pada tingkatan desa/kelurahan. Dalam kegiatan penyediaan perumahan, kebutuhan basis data perumahan dalam skala mikro menjadi kebutuhan yang nyata dan perlu diprioritaskan ketersediaannya. Disadari banyak pihak, bahwa bidang perumahan dan kawasan permukiman tergolong bidang yang sangat mengandalkan sistem data dan informasi yang baik, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Kegiatan perdataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 17 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki wewenang dalam menyusun dan menyediakan basis data Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tingkat provinsi. Basis data perumahan merupakan komponen penting untuk analisa dalam menentukan pilihan kebijakan atau memutuskan program penyelenggaraan perumahan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang Perumahan sehingga mengarahkan target yang menjadi sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perumahan.

Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan pemutakhiran database yang melibatkan seluruh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota sehingga dapat disepakati bersama SATU DATA PERUMAHAN SULAWESI TENGAH. Database ini memiliki beberapa kelompok data yakni data umum (jumlah penduduk dan kepala keluarga), data kawasan permukiman (luas wilayah, luas wilayah permukiman dan luas wilayah perumahan kumuh dan permukiman kumuh) data perumahan (jumlah rumah, rumah layak huni, rumah tidak layak huni dan kebutuhan rumah/backlog) serta data spesifik permukiman kumuh (jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah tangga miskin ekstrim dan jumlah balita stunting dalam kawasan kumuh). Selain melakukan publikasi melalui buku, Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Tahun 2025 juga dapat diakses melalui aplikasi SIPERKIM BANUATA pada link <http://databaseperkimtan.sultengprov.go.id>.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang.

Palu, 31 Desember 2025

Kepala Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Tengah



ABDUL HARIS KARIM, ST., MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700422 199303 1 011

TIM PENYUSUN

PENGARAH

ABDUL HARIS KARIM, ST.,MM
IR. MOHAMMAD AQSHAH, ST., M.SI
HARDIN NADJEMUDIN AR, ST.

PENYUSUN/EDITOR

Hatifah, ST., MT.
Rizqahidayahna, SE

KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA

Resti Hardiningrum, ST., Ferial Nento, ST.,
Moh. Sahrul, S.Ars, Milda, SE, Andini Istiningdyah, SP,
Moh. Agustiawan, Nurfriyawan Tonang, S.Ak, Ibrahim Vaezi, ST

NARAHUBUNG

Nomor Contac Person : (0451) 421121
Email : dinasperkimtanprovsteng@gmail.com
Instagram : disperkimtan_sultengprov

Silahkan hubungi kanal informasi di atas untuk memberikan kritik, masukan dan saran atas buku ini

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
A. GAMBARAN UMUM WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1
B. DEMOGRAFI PROVINSI SULAWESI TENGAH	3
C. GAMBARAN UMUM WILAYAH PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	5
D. PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PROVINSI SULAWESI TENGAH	7
E. DATABASE PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	8

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk (jiwa) dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	3
Tabel 2 Luas Wilayah dan Luas Wilayah Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	5
Tabel 3 Pembagian Wewenang Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah	8
Tabel 4 Rekapitulasi Data Base Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	16
Tabel 5 Rekapitulasi DataBase Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Persentase)	17

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah	2
Peta Profil Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	18

DAFTAR DIAGRAM

	halaman
Diagram Persentase Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025	3
Diagram Jumlah Penduduk dan kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025	4
Diagram Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025	5
Diagram Persentase Luas Wilayah Permukiman dan peruntukan lain di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	6
Diagram Persentase Sebaran Luas Wilayah Permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	6
Diagram Persentase Luas Permukiman Kumuh terhadap Luas Permukiman Tidak Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	7
Diagram Persentase Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025	7
Diagram Pembagian Wewenang Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah	8
Diagram Perbandingan Jumlah Rumah dan Kebutuhan Rumah (backlog) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	10
Diagram Perbandingan Rumah Layak Huni (RLH) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	10
Diagram Sebaran Jumlah Rumah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	11
Diagram Sebaran Jumlah Rumah Layak Huni Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	12
Diagram Sebaran Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	13
Diagram Sebaran Jumlah Backlog Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	14
Diagram Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga. Jumlah Rumah. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Dan Backlog Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	15

DAFTAR GRAFIK

halaman

Grafik Pertumbuhan Luas Permukiman Di Provinsi Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir 6

Grafik Pertumbuhan Luas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Provinsi Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir.....7

Grafik Trend Perubahan Jumlah KK, Jumlah Rumah dan Backlog di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2025.....9

Grafik Trend Perubahan Jumlah Rumah, Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2025 9

Grafik Persentase Pertumbuhan Kk Yang Memiliki Rumah Di Provinsi Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir 11

Grafik Persentase Pertumbuhan Jumlah Rumah Layak Huni Di Provinsi Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir.....12

Grafik Persentase Pertumbuhan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Di Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir 13

Grafik Persentase Pertumbuhan Jumlah Kebutuhan Rumah Di Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir 14

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Kota Palu, terletak di antara 2°22' Lintang Utara-3°48' Lintang Selatan dan 119°22'-124°22' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi, dengan luas wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 mencapai 6.160.572 Ha.

Adapun batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo
- Sebelah Timur : Provinsi Maluku
- Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan & Provinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Penduduk asli Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 15 kelompok etnis atau suku, yaitu : 1) Etnis Kaili; 2) Etnis Kulawi; 3) Etnis Lore; 4) Etnis Pamona; 5) Etnis Mori; 6) Etnis Bungku; 7) Etnis Saluan atau Loinang; 8) Etnis Balantak; 9) Etnis Mamasa; 10) Etnis Taa; 11) Etnis Bare'e; 12) Etnis Banggai; 13) Etnis Buol; 14) Etnis Toli-Toli dan 15) Etnis Tomini. Hasil pemetaan Barbara F. Grimes (1991) menunjukkan bahwa dari aspek ethnologi terdapat 30 bahasa utama dengan 67 macam dialek yang digunakan oleh 928.200 orang sebagai bahasa ibu di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2015, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 (satu) kota, yakni :

1. Kota Palu;
2. Kabupaten Sigi;
3. Kabupaten Donggala;
4. Kabupaten Parigi Moutong;
5. Kabupaten Poso;
6. Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Kabupaten Banggai;
8. Kabupaten Banggai Kepulauan;
9. Kabupaten Banggai Laut;
10. Kabupaten Buol;
11. Kabupaten Toli Toli;
12. Kabupaten Morowali; dan
13. Kabupaten Morowali Utara



Gambar 1 *Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah*

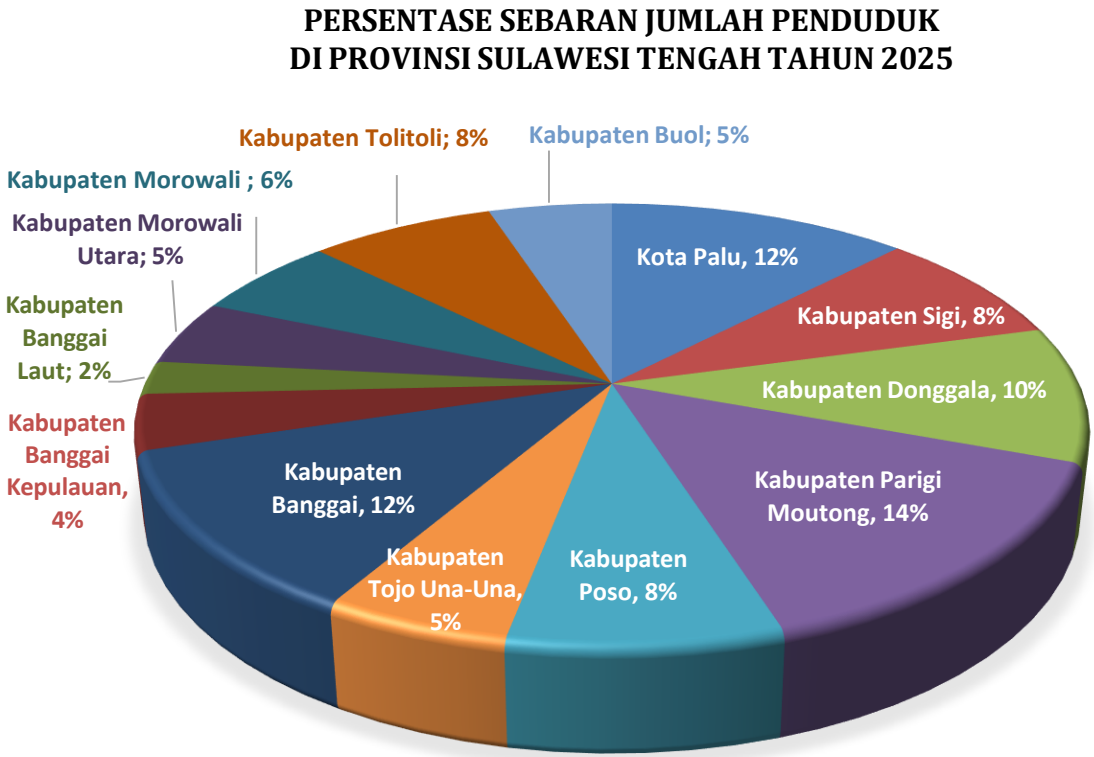
B. DEMOGRAFI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diuraikan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 3.185.128 jiwa dan 1.059.260 Kepala Keluarga. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pendataan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada semua kabupaten/kota sepanjang tahun 2025.

Tabel 1 Jumlah Penduduk (jiwa) dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

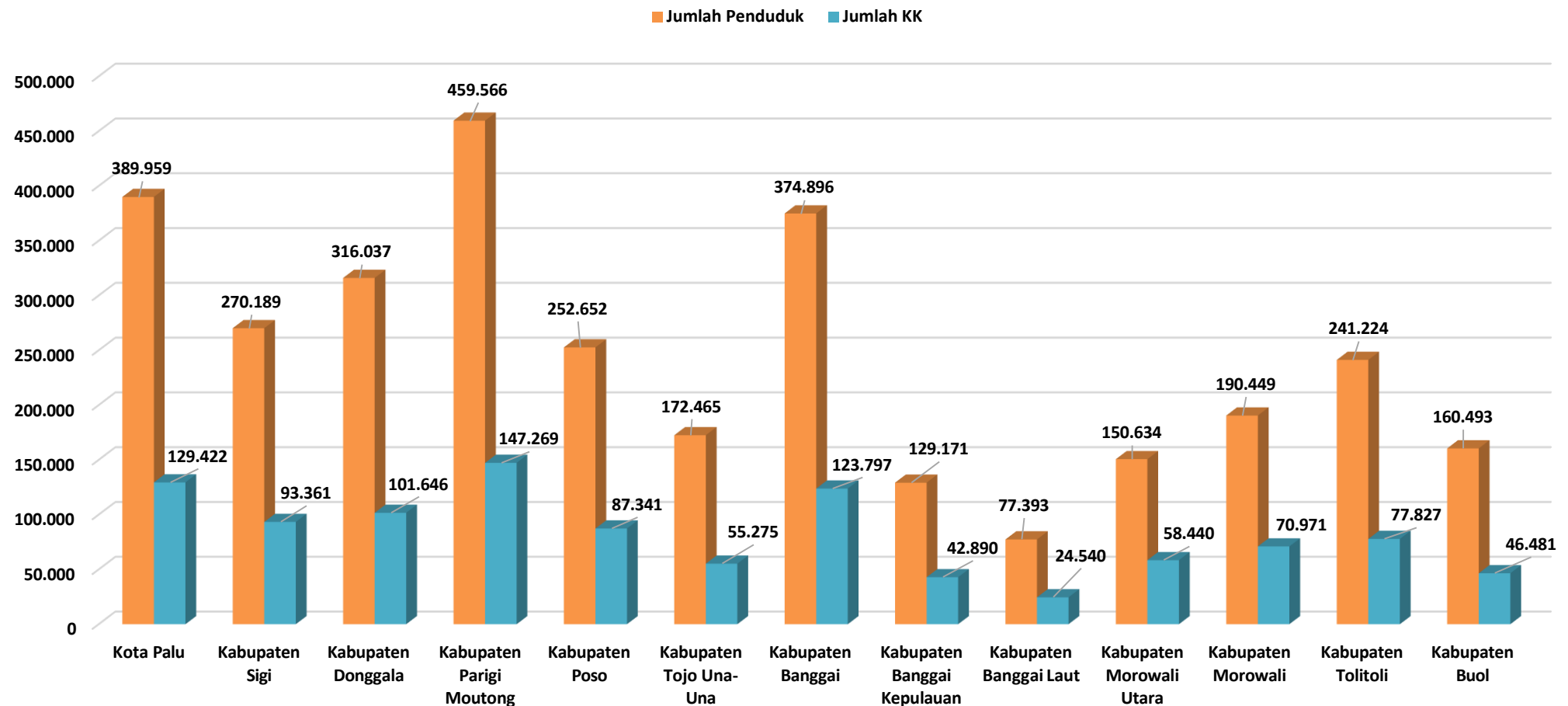
Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	Data Demografi	
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK (Jiwa)
72.01	Kab. Banggai	389.959	129.422
72.02	Kab. Poso	270.189	93.361
72.03	Kab. Donggala	316.037	101.646
72.04	Kab. Tolitoli	459.566	147.269
72.05	Kab. Buol	252.652	87.341
72.06	Kab. Morowali	172.465	55.275
72.07	Kab. Banggai Kepulauan	374.896	123.797
72.08	Kab. Parigi Moutong	129.171	42.890
72.09	Kab. Tojo Una-una	77.393	24.540
72.10	Kab. Sigi	150.634	58.440
72.11	Kab. Banggai Laut	190.449	70.971
72.12	Kab. Morowali Utara	241.224	77.827
72.71	Kota Palu	160.493	46.481
Jumlah		3.185.128	1.059.260

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025



Gambar 2.
Diagram Persentase Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

Diagram Jumlah Penduduk dan kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025



Gambar 3. Diagram Jumlah Penduduk dan kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

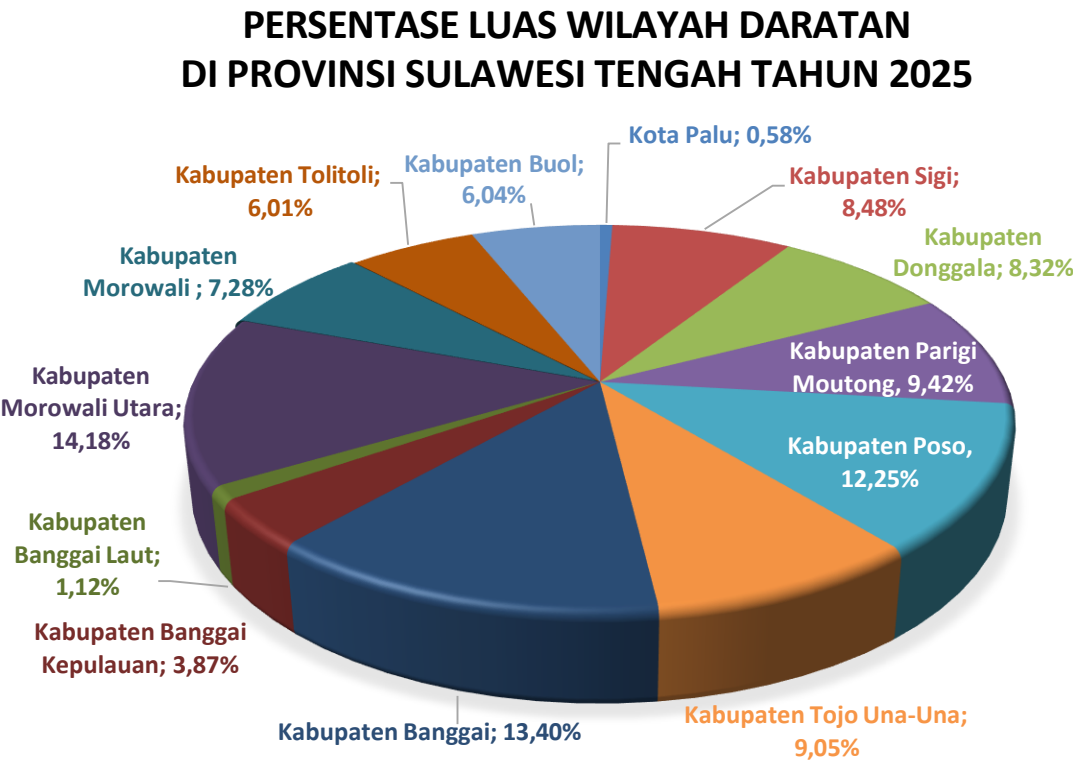
C. GAMBARAN UMUM WILAYAH PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2022 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 diuraikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah sebesar 6.160.572 Ha. Morowali Utara merupakan Kabupaten dengan wilayah terluas sebesar 873.601 Ha atau 14,18%, sedangkan Kota Palu sebagai Ibukota Provinsi memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yaitu seluas 35.635 Ha atau 0,58% dari luas keseluruhan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rincian luas wilayah Kabupaten/Kota serta luas wilayah permukiman dapat dilihat pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2 Luas Wilayah dan Luas Wilayah Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	
		Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah Permukiman (Ha)
72.01	Kab. Banggai	35.635	6.345
72.02	Kab. Poso	522.544	4.035
72.03	Kab. Donggala	512.659	6.214
72.04	Kab. Tolitoli	580.561	23.950,06
72.05	Kab. Buol	754.593	2.674
72.06	Kab. Morowali	557.286	2.789
72.07	Kab. Banggai Kepulauan	825.288	4.496,45
72.08	Kab. Parigi Moutong	238.507	1.110
72.09	Kab. Tojo Una-una	68.815	479
72.10	Kab. Sigi	873.601	1.497
72.11	Kab. Banggai Laut	448.689	1.957
72.12	Kab. Morowali Utara	370.037	3.541
72.71	Kota Palu	372.358	3.747
	Jumlah	6.160.572	62.835

Sumber : Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 dan Dinas PKP Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Gambar 4. Diagram Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

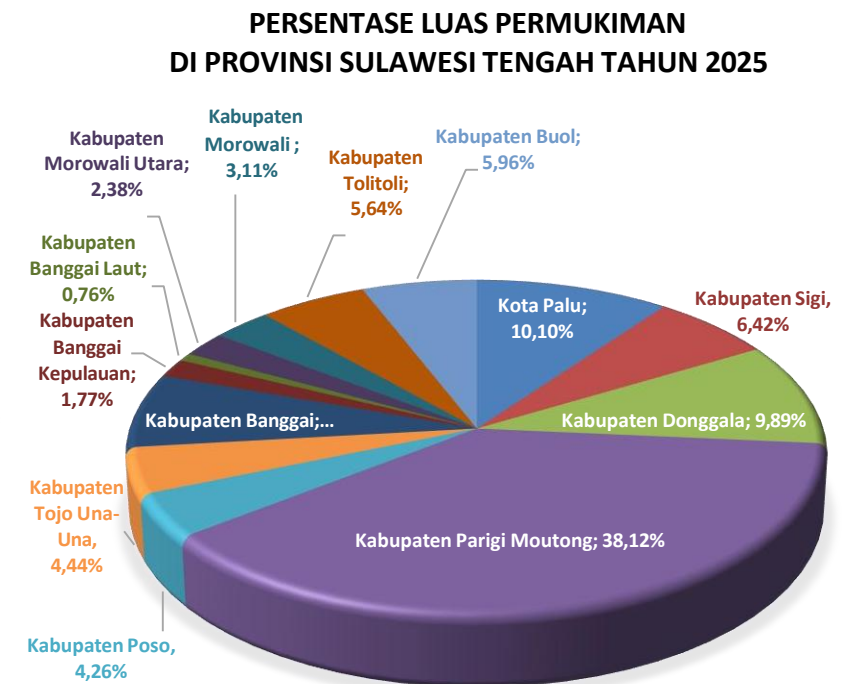
Luas wilayah permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan dalam 7 tahun terakhir. Tahun 2019, luas permukiman sebesar 51.286 Ha kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 mencapai 72.492 Ha atau 1,18% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, pada tahun 2024 luas wilayah permukiman mengalami penurunan kembali menjadi 62.835 Ha atau 1,02% dan di tahun 2025 luas wilayah 62.835 Ha dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun wilayah permukiman terluas berada di Kabupaten Parigi Moutong yang mencapai 38,12% dari keseluruhan luas permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Laut merupakan kabupaten dengan luas wilayah permukiman terkecil yakni seluas 479 Ha atau sekitar 0,76% dari luas permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 5.
Grafik Pertumbuhan Luas Permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah 6 Tahun Terakhir



Gambar 6.
Persentase Luas Wilayah Permukiman dan peruntukan lain di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

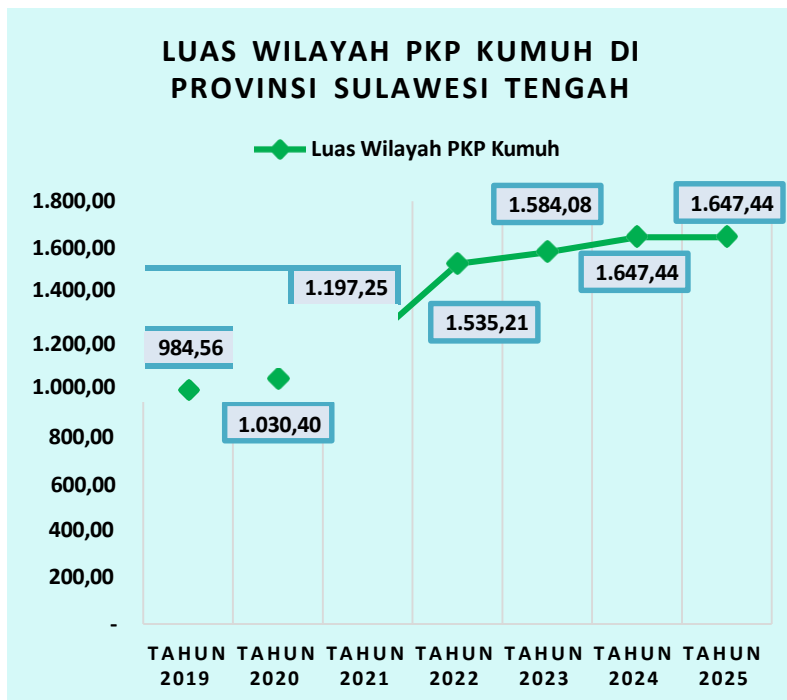


Gambar 7.
Persentase Sebaran Luas Wilayah Permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

D. PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar dari 984,56 Ha tahun 2019 menjadi 1.647,44 Ha tahun 2025. Luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2025 mencapai 2,62% dari luas wilayah permukiman di Provinsi Sulawesi Tengah.

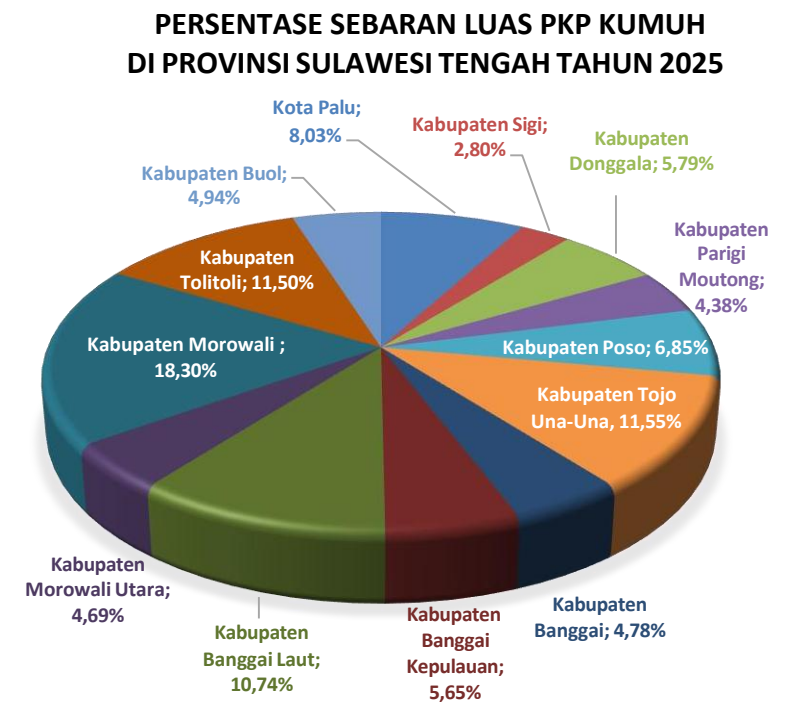
Kabupaten Morowali merupakan wilayah yang memiliki luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh paling besar yang mencapai 18,30 % atau seluas 301,43 Ha dan Kabupaten Sigi dengan luas terkecil yakni 46,17 ha atau 2,80 % dari luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 8.
Grafik Pertumbuhan Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir



Gambar 9.
Diagram Persentase Luas Perumahan Kumuh terhadap Luas Permukiman Tidak Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Gambar 10.
Diagram Persentase Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

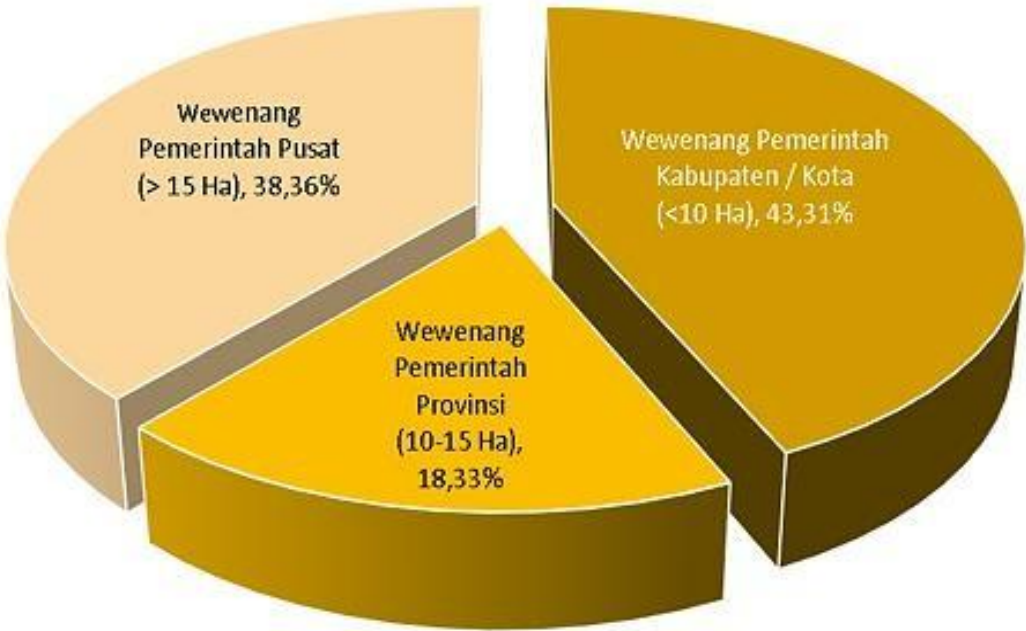
Semakin meningkatnya luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah membutuhkan penanganan yang maksimal dari semua unsur pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Pembagian wewenang untuk penanganannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas; Pemerintah Pusat pada luas >15 Ha, Pemerintah Provinsi pada luas 10-15 Ha dan Pemerintah Kabupaten Kota pada luas <10 Ha. Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh mencapai 1.647,44 Ha memiliki penanganan 38,36% oleh Pemerintah Pusat, 18,33% oleh Pemerintah Provinsi dan 43,31% oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Pembagian Wewenang Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah

Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	Luas (ha) Wewenang Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
		Luas Keseluruhan (Ha)	Pemerintah Kabupaten/ Kota (<10 ha)	Pemerintah Provinsi (10-15 ha)	Pemerintah Pusat (>15 ha)
72.01	Kab. Banggai	132,35	108,85	23,50	-
72.02	Kab. Poso	46,17	14,98	-	31,19
72.03	Kab. Donggala	95,39	40,65	35,16	19,58
72.04	Kab. Tolitoli	72,11	60,11	12,00	-
72.05	Kab. Buol	112,79	46,08	10,10	56,61
72.06	Kab. Morowali	190,30	60,40	92,50	37,40
72.07	Kab. Banggai Kepulauan	78,81	39,50	20,37	18,94
72.08	Kab. Parigi Moutong	93,00	62,00	14,00	17,00
72.09	Kab. Tojo Una-una	177,00	127,20	49,80	-
72.10	Kab. Sigi	77,20	54,20	23,00	-
72.11	Kab. Banggai Laut	301,43	67,76	11,08	222,59
72.12	Kab. Morowali Utara	189,46	-	-	189,46
72.71	Kota Palu	81,43	31,82	10,45	39,16
	Jumlah	1.647,44	713,55	301,96	631,93

Sumber : SK Bupati/Walikota tentang PKP Kumuh

PRESENTASI KEWENANGAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

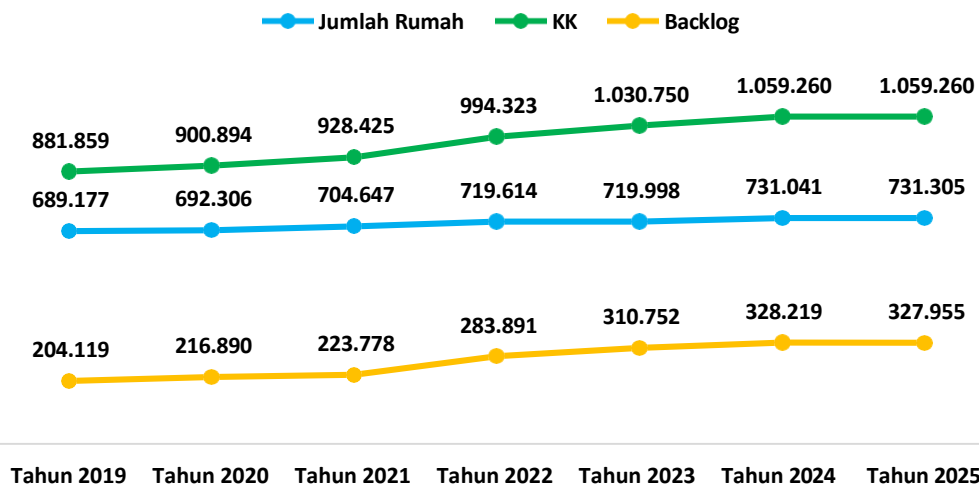


Gambar 11.
Pembagian Wewenang Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Sulawesi Tengah

E. DATABASE PERUMAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

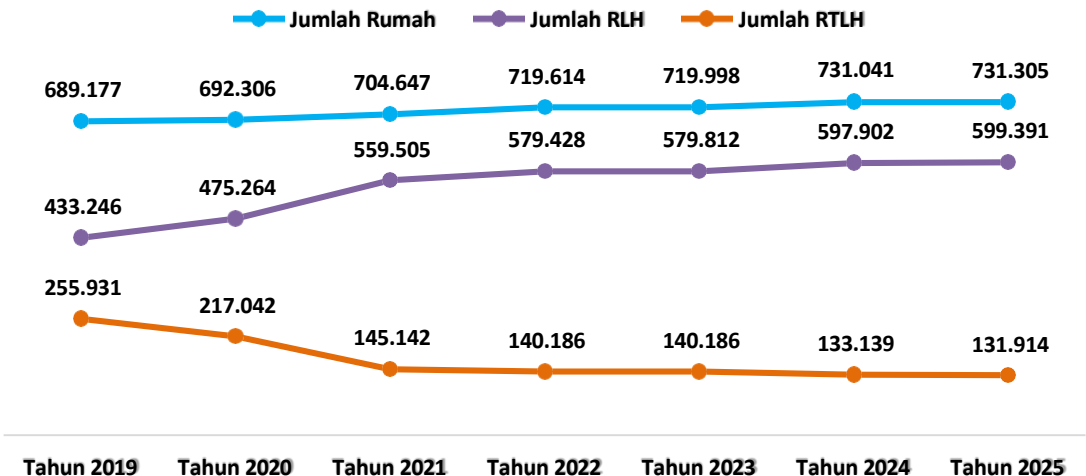
Database perumahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan data sektoral yang terdiri atas jumlah rumah, rumah layak huni, rumah tidak layak huni, dan kebutuhan rumah (backlog). Data-data tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun baik mengalami kenaikan maupun penurunan. Kecenderungan (trend) perubahan data dalam 7 (tujuh) tahun terakhir dari variable-variabel pendataan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa grafik di bawah ini menyajikan perubahan data dari setiap variable dari tahun 2019-2025.

TREND PERUBAHAN JUMLAH KK, JUMLAH RUMAH DAN BACKLOG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH



Gambar 12. Trend Perubahan Jumlah KK, Jumlah Rumah dan Backlog di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2025

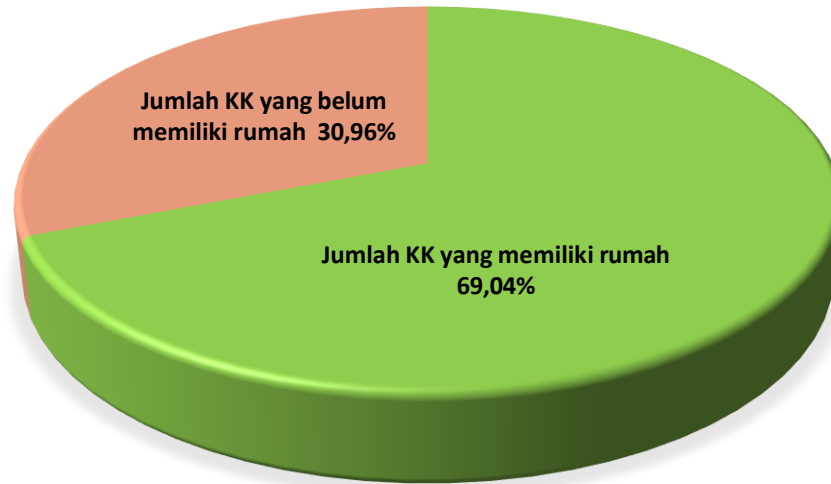
TREND PERUBAHAN JUMLAH RUMAH, JUMLAH RLH DAN JUMLAH RTLH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH



Gambar 13. Trend Perubahan Jumlah Rumah, Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2025

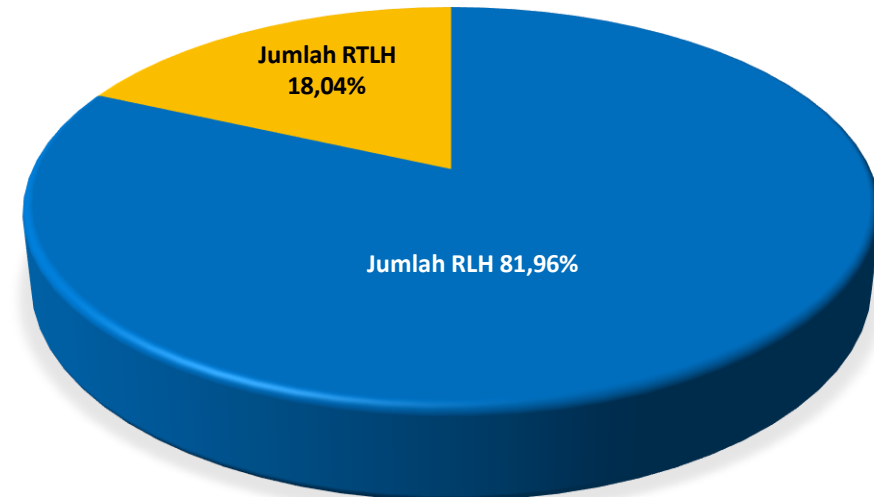
Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, jumlah kepala keluarga mengalami peningkatan yang dibarengi pula oleh peningkatan jumlah rumah. Namun, disisi lain tentunya juga akan meningkatkan jumlah kebutuhan rumah setiap tahunnya. Jumlah rumah di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2025, yang diikuti dengan peningkatan jumlah rumah layak huni tahun 2019 – 2025 dan di sisi lain jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan di tahun yang sama. Hal ini merupakan dampak dari sinergi antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah.

PERBANDINGAN JUMLAH KK YANG MEMILIKI RUMAH DAN JUMLAH KK YANG BELUM MEMILIKI RUMAH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025



Gambar 14.
Diagram Perbandingan Jumlah Rumah dan Kebutuhan Rumah (backlog) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

PERBANDINGAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH) DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025



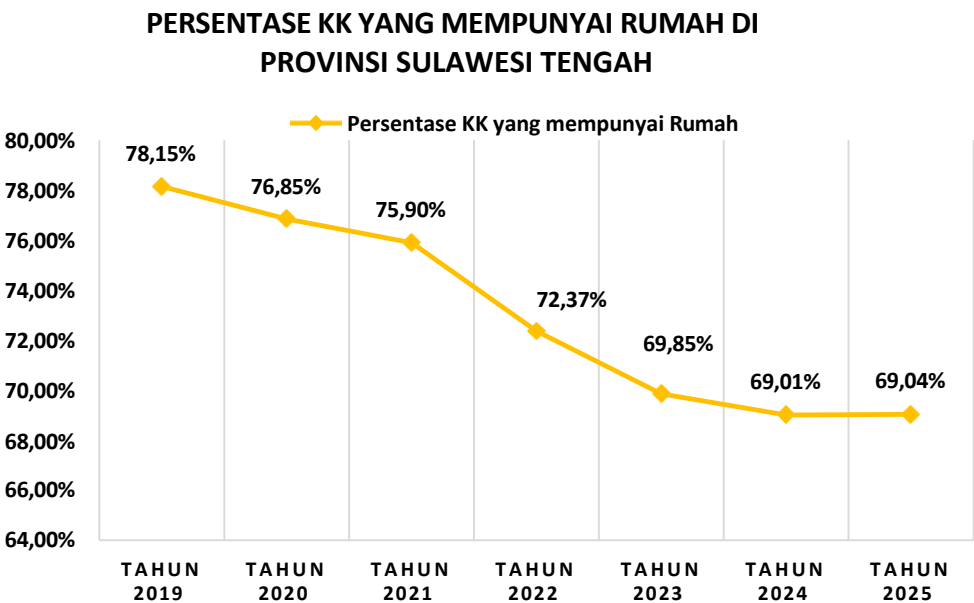
Gambar 15.
Diagram Perbandingan Rumah Layak Huni (RLH) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Secara ideal, 1 kepala keluarga seharusnya menempati 1 unit rumah. Namun pada kenyataannya pada tahun 2025, Sulawesi Tengah baru memiliki 69,04% kepala keluarga yang telah memiliki rumah atau sejumlah 731.305 KK sehingga masih terdapat sekitar 30,96% kepala keluarga yang belum memiliki rumah. Hal ini mengakibatkan kebutuhan rumah yang masih harus dipenuhi sejumlah 327.955 unit. Kebutuhan rumah ini menurun dari tahun sebelumnya hanya berjumlah 328.219 unit karena disebabkan oleh peningkatan jumlah kepala keluarga.

Dari jumlah rumah yang dimiliki oleh kepala keluarga, sekitar 81,96% atau 599.391 unit merupakan rumah layak huni yang telah memenuhi persyaratan kecukupan luas, kenyamanan ruang (penghawaan dan pencahayaan yang baik), keselamatan bangunan (kelayakan struktur dan material bangunan) dan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) dasar hunian dengan komponen dasar lingkungan yang memastikan hunian layak,nyaman, aman dan sehat dengan adanya jaringan air bersih dan MCK yang baik. Sedangkan sekitar 18,04% atau 131.914 unit rumah yang ada masih merupakan rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan,kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya serta membutuhkan peningkatan kualitas agar menjadi layak huni. Berbagai bantuan peningkatan kualitas rumah dari berbagai sumber pendanaan dan skema pengelolaan telah diberikan oleh pemerintah sehingga tahun 2025 jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 133,139 unit.

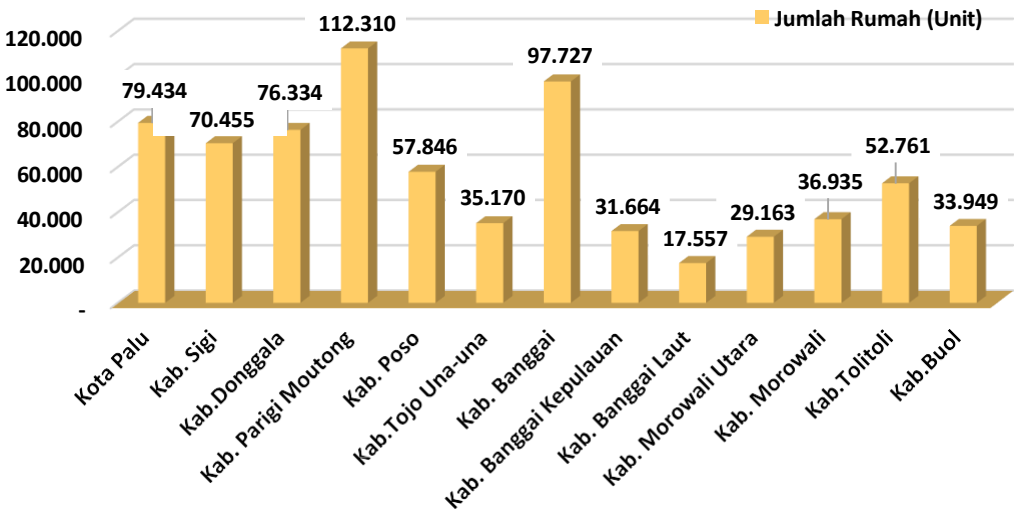
JUMLAH RUMAH

Secara persentase, dapat dilihat pertumbuhan jumlah kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memiliki rumah mengalami penurunan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. Jumlah kepala keluarga yang memiliki rumah mengalami kenaikan hingga menjadi 69,04% pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi namun tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah sehingga kenaikan jumlah rumah hanya 0,03% . Dari segi jumlah (unit), ketersediaan rumah mengalami peningkatan dalam 7 (tujuh) Tahun terakhir dengan Jumlah Ketersediaan Rumah Pada tahun 2019 sejumlah 689.177 unit meningkat menjadi 731.305 Unit pada tahun 2025 .



Gambar 16 Persentase Pertumbuhan KK yang Memiliki Rumah di Provinsi Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir

Sebaran Jumlah Rumah (Unit) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



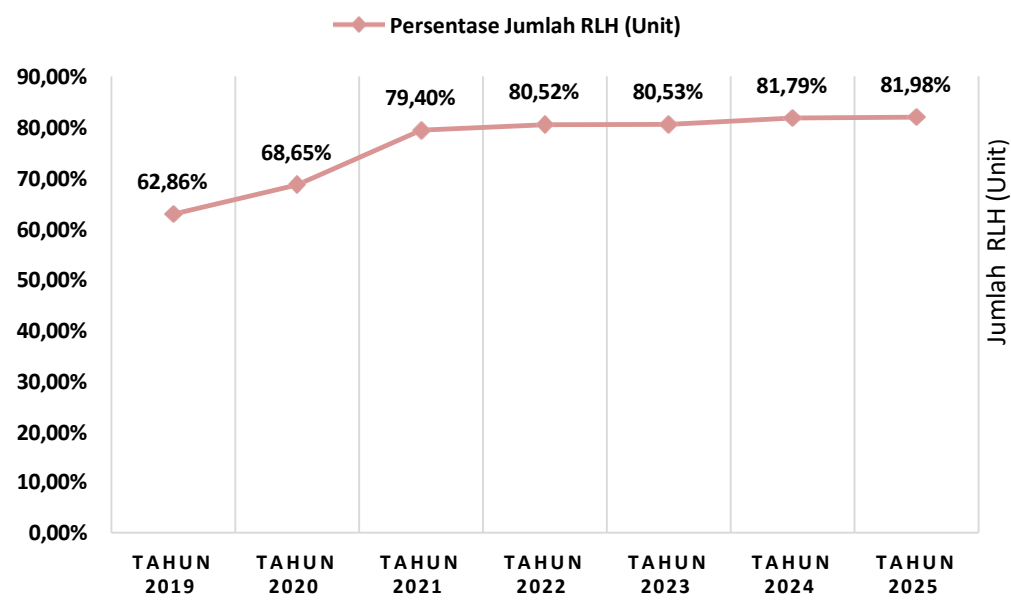
Gambar 17 Diagram Sebaran Jumlah Rumah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2025, sebaran jumlah rumah di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong memiliki jumlah rumah terbesar yakni sekitar 112.310 unit. Hal ini ditunjang oleh jumlah kepala keluarga yang besar di Kabupaten tersebut. Selanjutnya, Kabupaten Banggai di urutan kedua sejumlah 97.727 unit yang memiliki peningkatan jumlah rumah yang dari tahun sebelumnya. Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah kepala keluarga terendah berdampak pada kecilnya jumlah rumah yang tersedia dibanding wilayah-wilayah lain di Provinsi Sulawesi Tengah yakni sejumlah 17.557 unit.

JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI (RLH)

Pertumbuhan rumah layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah dalam 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan oleh kinerja pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah. Peningkatan jumlah rumah layak huni yang cukup signifikan pada tahun 2021 mencapai 79,40% dan mulai meningkat secara perlahan hingga mencapai 81,98% pada tahun 2025. Peningkatan jumlah rumah layak huni tersebut memiliki pertumbuhan rata-rata 3,78% setiap tahunnya.

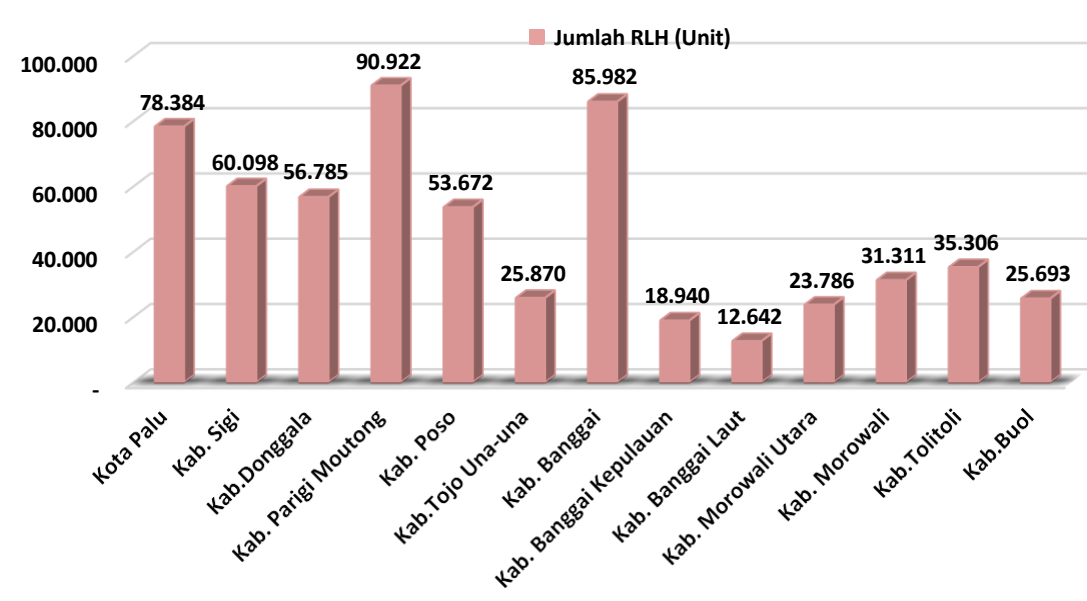
PERSENTASE PERTUMBUHAN RUMAH LAYAK HUNI (RLH)
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH



Gambar 18 Persentase Pertumbuhan Jumlah Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir

Sebaran jumlah rumah layak huni pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 19 di atas. Diagram tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah rumah terbesar memiliki rumah layak huni tertinggi mencapai 90.922 unit. Selanjutnya di urutan kedua dan ketiga terdapat Kabupaten Banggai 85.982 unit dan Kota Palu 78.384 unit. Kabupaten Banggai laut yang memiliki jumlah rumah terkecil juga memiliki rumah layak huni paling rendah sekitar 12.642 unit.

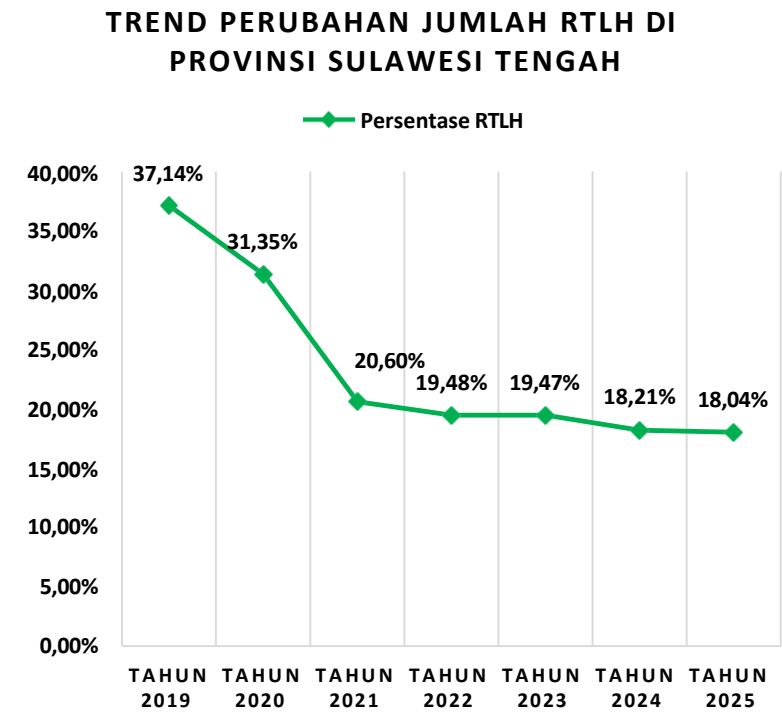
Sebaran Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025



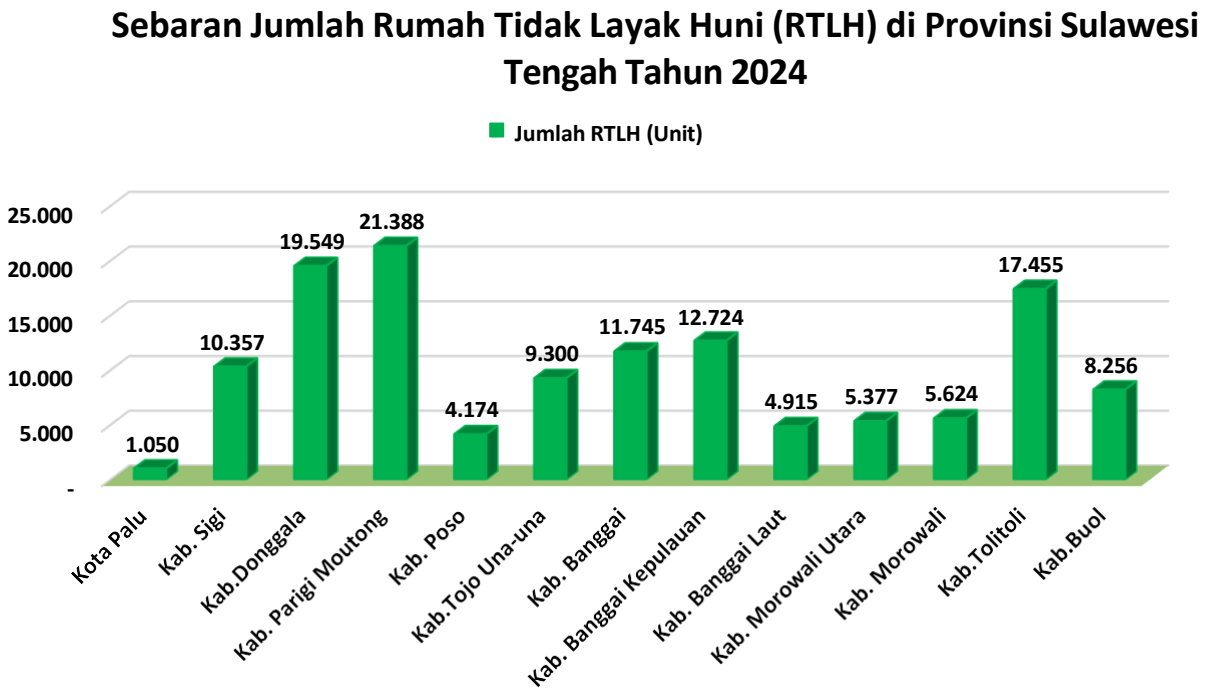
Gambar 19 Diagram Sebaran Jumlah Rumah Layak Huni pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI (RTLH)

Pertumbuhan rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah dalam 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami penurunan pesat pada tahun 2021 menjadi 20,60% dan mulai menurun secara perlahan hingga tahun 2025 mencapai 18,04%. Persentase jumlah rumah tidak layak huni mengalami penurunan rata-rata 3,78% setiap tahunnya.



Gambar 20 *Persentase Pertumbuhan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Sulawesi Tengah 7 Tahun Terakhir*



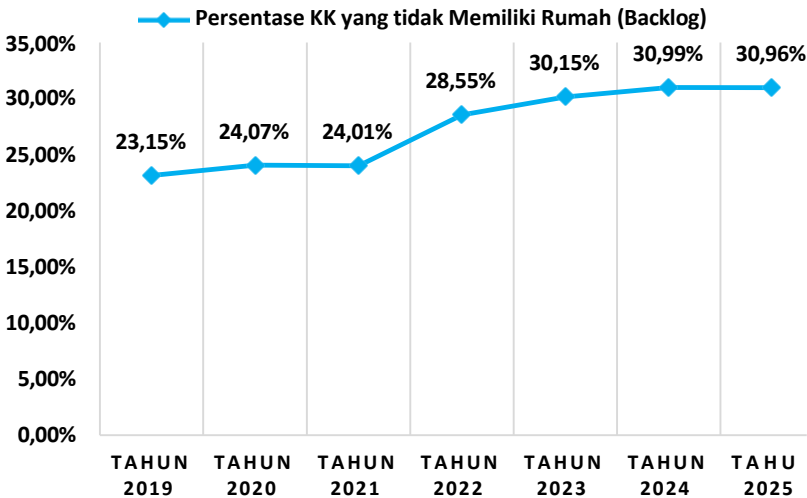
Gambar 21 *Diagram Sebaran Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025*

Sebaran jumlah rumah tidak layak huni pada wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 21. Di atas Diagram tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Parigi Moutong merupakan wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni paling tinggi yang mencapai 21.388 unit dimana mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 21.473 unit. Jumlah rumah tidak layak huni terendah ditemukan di Kota Palu yakni sekitar 1.050 unit jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah 1.298 unit.

JUMLAH KEBUTUHAN RUMAH (BACKLOG)

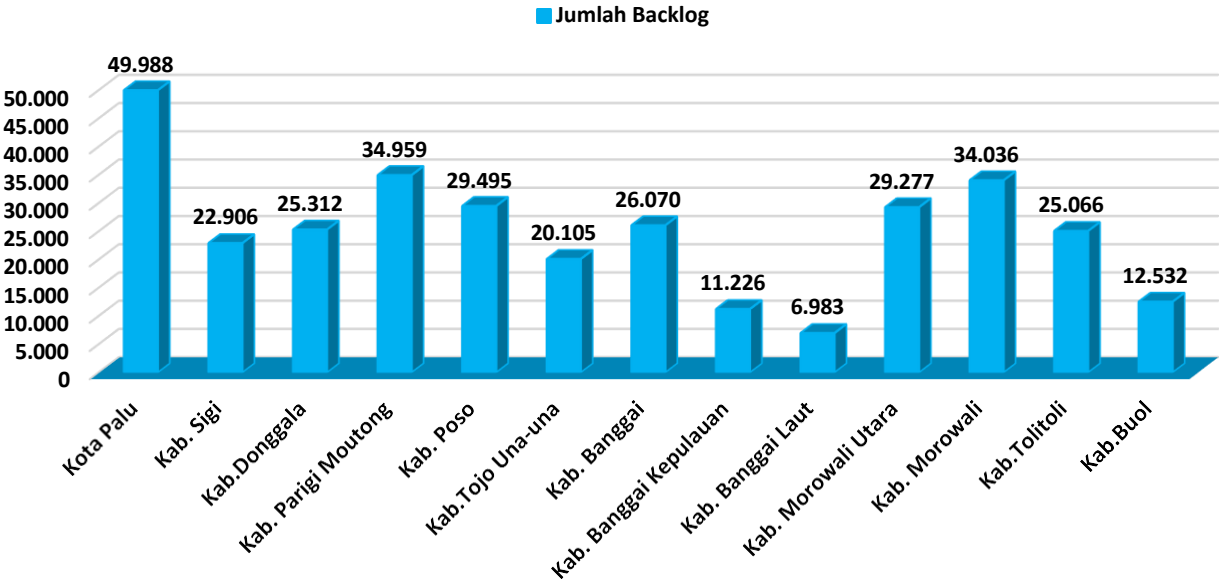
Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa jumlah kebutuhan rumah dalam 7 (tujuh) tahun terakhir mengalami penurunan hingga tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh angka pertumbuhan jumlah rumah lebih tinggi di banding dengan jumlah kepala keluarga sehingga sampai tahun 2025 mencapai 1.059.260 Jiwa.

PERSENTASE PERTUMBUHAN KEBUTUHAN RUMAH (BACKLOG) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH



Gambar 22 Persentase Pertumbuhan Jumlah Kebutuhan Rumah di Sulawesi Tengah Tahun Terakhir

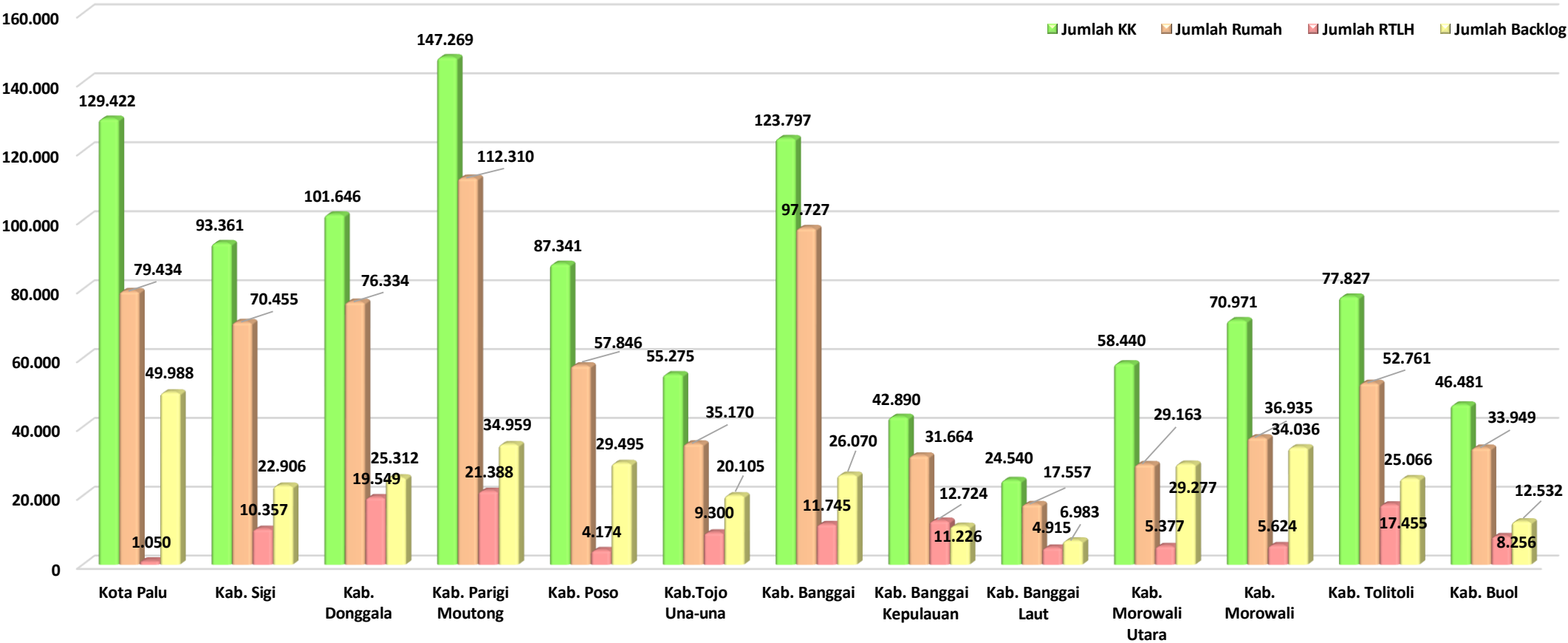
Sebaran Jumlah Kebutuhan Rumah (Backlog) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Gambar 23 Diagram Sebaran Jumlah Backlog pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Kota Palu merupakan wilayah dengan jumlah kebutuhan rumah (backlog) yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kebutuhan rumah tersebut mencapai 49.988 unit. Selanjutnya kebutuhan rumah tertinggi berikut adalah Kabupaten Parigi Moutong mencapai 34.959 unit. Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah kebutuhan rumah mencapai 6.983 unit merupakan jumlah paling kecil di Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam hal penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang masuk dalam kategori backlog di Provinsi Sulawesi Tengah.

Diagram Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga, Jumlah Rumah, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Backlog di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025



Gambar 24 Diagram Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga. Jumlah Rumah. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Backlog di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Diagram pada gambar 24 di atas menunjukkan perbandingan jumlah rumah dan kebutuhan rumah serta rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah kepala keluarga akan berpengaruh terhadap penambahan jumlah rumah serta kebutuhan rumah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 4 Rekapitulasi Data Base Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	DATA											
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Rumah	RLH (Unit)	RTLH (Unit)	Backlog (Unit)	Luas Permukiman (Ha)	Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Ha)	RTLH dalam Permukiman Kumuh (unit)	Jumlah Kepala Keluarga yang menempati RLH (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga yang menempati RTLH (Jiwa)
72.01	Kab. Banggai	374.896	123.797	825.288	97.727	85.708	11.745	26.070	4.496	78,81	576	108.919	14.878
72.02	Kab. Poso	252.652	87.341	754.593	57.846	53.551	4.174	29.495	2.674	112,79	101	81.039	6.302
72.03	Kab. Donggala	316.037	101.646	512.659	76.334	56.539	19.549	25.312	6.214	95,39	728	75.615	26.031
72.04	Kab. Tolitoli	241.224	77.827	370.037	52.761	35.263	17.455	25.066	3.541	189,46	1.208	52.079	25.748
72.05	Kab. Buol	160.493	46.481	372.358	33.949	25.668	8.256	12.532	3.747	81,43	771	35.177	11.304
72.06	Kab. Morowali	190.449	70.971	448.689	36.935	31.301	5.624	34.036	1.957	301,43	1.383	60.164	10.807
72.07	Kab. Banggai Kepulauan	129.171	42.890	238.507	31.664	18.932	12.724	11.226	1.110	93	2.095	25.655	17.235
72.08	Kab. Parigi Moutong	459.566	147.269	580.561	112.310	90.827	21.388	34.959	23.950	72,11	2.153	119.224	28.045
72.09	Kab. Tojo Una-una	172.465	55.275	557.286	35.170	25.804	9.300	20.105	2.789	190,3	1.260	40.659	14.616
72.10	Kab. Sigi	270.189	93.361	522.544	70.455	59.904	10.357	22.906	4.035	46,17	336	79.637	13.724
72.11	Kab. Banggai Laut	77.393	24.540	68.815	17.557	12.601	4.915	6.983	479	177	2.621	17.670	6.870
72.12	Kab. Morowali Utara	150.634	58.440	873.601	29.163	23.668	5.377	29.277	1.497	77,2	569	47.665	10.775
72.71	Kota Palu	389.959	129.422	35.635	79.434	78.136	1.050	49.988	6.345	132,35	876	127.711	1.711
TOTAL		3.185.128	1.059.260	6.160.573	731.305	597.902	131.914	327.955	62.834,51	1.647,44	14.677	871.214	188.046

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

Tabel 5 Rekapitulasi Data Base Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (Persentase)

Kode Wilayah	Kabupaten/ Kota	DATA								
		Persentase KK yang memiliki Rumah	Persentase RLH Terhadap Jumlah Rumah	Persentase RTLH Terhadap Jumlah Rumah	Persentase KK yang tidak memiliki Rumah (Backlog)	Persentase Luas Permukiman Terhadap Luas Wilayah	Persentase Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Terhadap Luas Permukiman Terhadap Luas Permukiman	Persentase RTLH dalam Permukiman Kumuh Terhadap Jumlah RTLH	Persentase Kepala Keluarga yang menempati RLH	Persentase Kepala Keluarga yang menempati RTLH
72.01	Kab. Banggai	78,94 %	87,70 %	12,02 %	21,06 %	0,54 %	1,75 %	4,90 %	87,98 %	12,02 %
72.02	Kab. Poso	66,23 %	92,58 %	7,22 %	33,77 %	0,35 %	4,22 %	2,42 %	92,78 %	7,22 %
72.03	Kab. Donggala	75,10 %	74,07 %	25,61 %	24,90 %	1,21 %	1,54 %	3,72 %	74,39 %	25,61 %
72.04	Kab. Tolitoli	67,79 %	66,84 %	33,08 %	32,21 %	0,96 %	5,35 %	6,92 %	66,92 %	33,08 %
72.05	Kab. Buol	73,04 %	75,61 %	24,32 %	26,96 %	1,01 %	2,17 %	9,34 %	75,68 %	24,32 %
72.06	Kab. Morowali	52,04 %	84,75 %	15,23 %	47,96 %	0,44 %	15,40 %	24,59 %	84,77 %	15,23 %
72.07	Kab. Banggai Kepulauan	73,83 %	59,79 %	40,18 %	26,17 %	0,47 %	8,38 %	16,46 %	59,82 %	40,18 %
72.08	Kab. Parigi Moutong	76,26 %	80,87 %	19,04 %	23,74 %	4,13 %	0,30 %	10,07 %	80,96 %	19,04 %
72.09	Kab. Tojo Una-una	63,63 %	73,37 %	26,44 %	36,37 %	0,50 %	6,82 %	13,55 %	73,56 %	26,44 %
72.10	Kab. Sigi	75,47 %	85,02 %	14,70 %	24,53 %	0,77 %	1,14 %	3,24 %	85,30 %	14,70 %
72.11	Kab. Banggai Laut	71,54 %	71,77 %	27,99 %	28,46 %	0,70 %	36,95 %	53,33 %	72,00 %	28,00 %
72.12	Kab. Morowali Utara	49,90 %	81,16 %	18,44 %	50,10 %	0,17 %	5,16 %	10,58 %	81,56 %	18,44 %
72.71	Kota Palu	61,38 %	98,37 %	1,32 %	38,62 %	17,81 %	2,09 %	83,43 %	98,68 %	1,32 %
Persentase		69,04 %	81,76 %	18,04 %	30,96 %	1,02 %	2,62 %	11,13 %	82,25 %	17,75 %

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

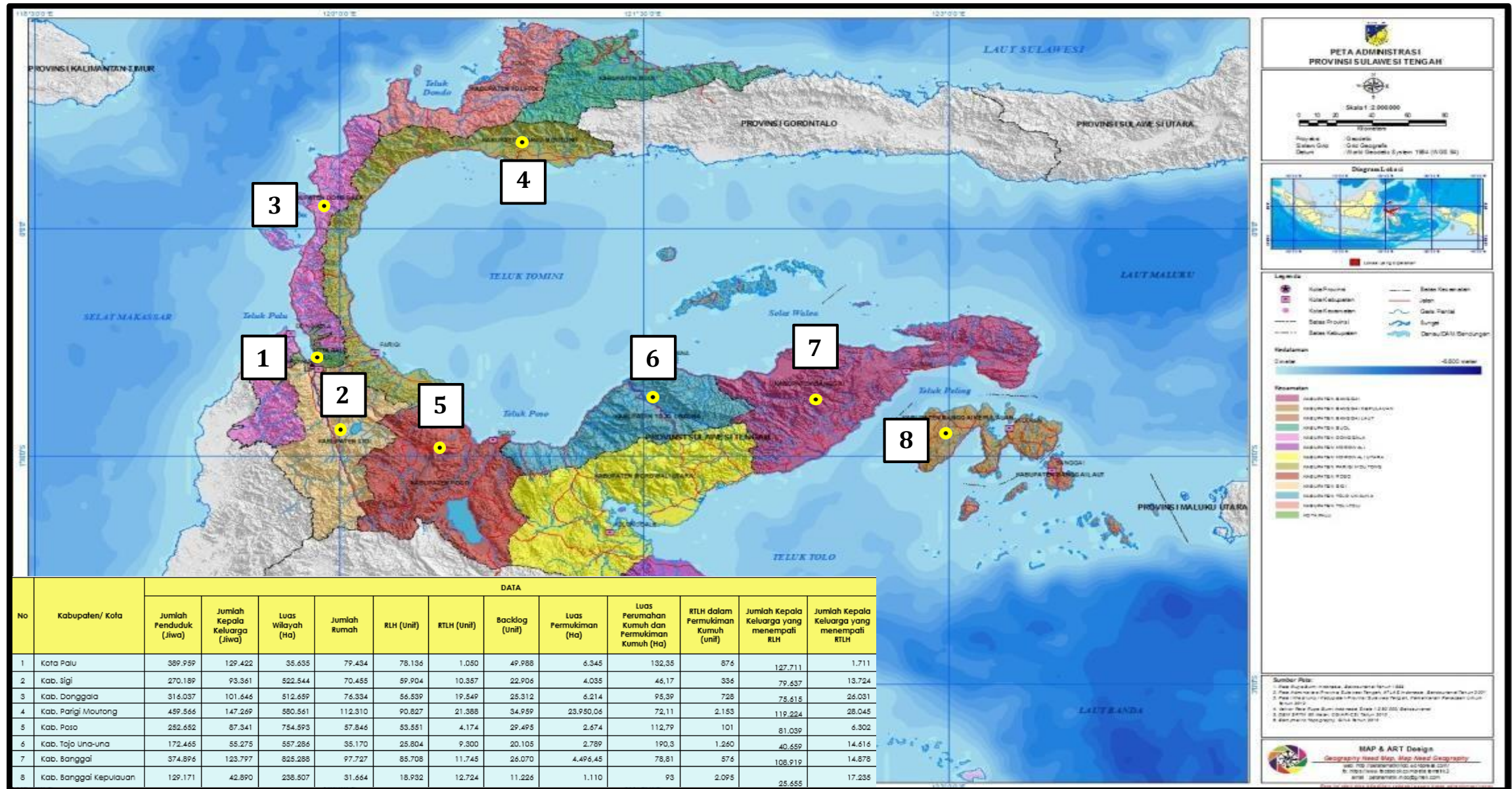
Rekapitulasi Data Base Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan kondisi perumahan keluarga dalam wilayah kajian menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat kepemilikan rumah, kualitas hunian, serta kondisi lingkungan permukiman. Konsep Keluarga yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Persentase kepala keluarga (KK) yang memiliki rumah tercatat sebesar 69,04%, sedangkan sebesar 30,96% lainnya belum memiliki rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar keluarga telah memiliki tempat tinggal, masih terdapat proporsi yang cukup signifikan yang belum memiliki hunian sendiri, sehingga berpotensi mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

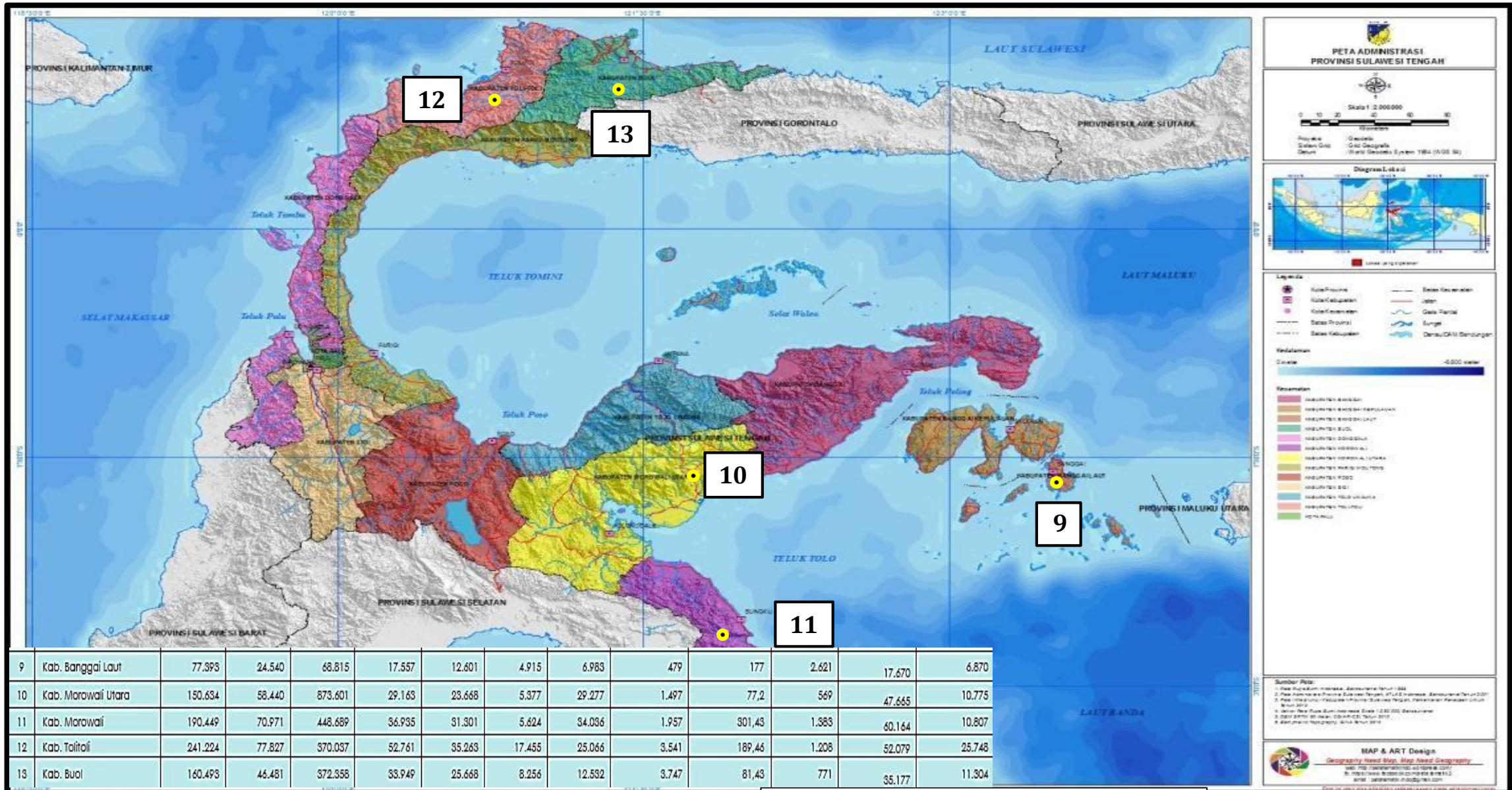
Dari kelompok kepala keluarga yang memiliki rumah, sebesar 81,96% telah menempati rumah layak huni, sementara 18,04% lainnya masih berada dalam kondisi rumah tidak layak huni. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan rumah belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya standar kelayakan hunian bagi keluarga, sehingga masih diperlukan intervensi untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal.

Jika ditinjau dari seluruh kepala keluarga, persentase yang menempati rumah layak huni mencapai 82,25%, sedangkan 17,75% lainnya menempati rumah tidak layak huni. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih terdapat keluarga yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya. dalam keterbatasan kualitas hunian yang dapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas anggota keluarga.

Lebih lanjut, dari total 17,75% rumah tidak layak huni tersebut, sebesar 11,02% berada di kawasan permukiman kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian keluarga yang memiliki tempat tinggal di rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya terkonsentrasi di lingkungan dengan kondisi infrastruktur dan sanitasi yang terbatas, sementara sebagian lainnya tersebar di luar kawasan kumuh. Dengan demikian, penanganan permasalahan ini perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, baik pada tingkat keluarga maupun kawasan.

Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa permasalahan perumahan keluarga tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rumah, tetapi juga kualitas hunian dan lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap kepemilikan rumah, memperbaiki kualitas rumah tidak layak huni, serta menata kawasan permukiman kumuh guna mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.





Peta Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025